

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang bersifat kompleks dan unik. Bersifat kompleks karena sekolah memuat berbagai dimensi yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan saling menentukan. Sedangkan sifatnya yang unik menunjukkan bahwa sekolah memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh lembaga lain seperti terjadinya proses pembelajaran kepada siswa dan terselenggaranya pembudayaan kehidupan kepada umat manusia.

Konteks kehidupan organisasi terutama organisasi atau institusi pendidikan, keuangan memegang peranan yang sangat penting. Mencermati hal ini maka sangat dibutuhkan manajemen yang tepat sehingga segala aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dapat terkoordinasi dengan baik. Pada institusi pendidikan pengelolaan keuangan merupakan tanggung jawab bersama seluruh stakeholder pendidikan yang ada dalam institusi pendidikan tersebut. Dalam hal ini pimpinan memegang peran signifikan sebagai pioner yang memelopori aktivitas dan kegiatan pengelolaan keuangan.

Kegiatan pengelolaan keuangan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan pendidikan secara keseluruhan yang dilakukan pada setiap institusi pendidikan. Sebagai kegiatan yang sangat prinsipil, pengelolaan keuangan harus dikelola secara profesional dengan akuntabilitas yang tinggi. Dalam mengelola keuangan pihak institusi perlu memiliki prinsip pengelolaan dana yang transparansi dan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Di samping itu perlu sikap jujur dari seluruh staf saling percaya dan saling bekerjasama dalam mengelola keuangan yang ada dalam institusi masing-masing.

Mengacu pada dana yang tersedia, setiap institusi perlu membuat rencana pengeluaran keuangan yang merupakan penjabaran dari program kerja. Hal tersebut biasanya telah dituangkan dalam Rencana Anggaran Institusi. Depdiknas (2000:96) mengemukakan langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan rencana anggaran pada suatu institusi pendidikan yakni: a) menginventaris program kegiatan selama satu tahun mendatang, b) menyusun program/kegiatan tersebut berdasarkan jenis dan prioritas, c) menghitung volume, harga satuan dan kebutuhan dana untuk setiap komponen kegiatan, d) membuat kertas kerja dan lembaran kerja, menentukan sumber dana dan pembebanan anggaran serta menuangkan kedalam format acuan guna mempertahankan anggaran yang diajukan.

Pihak institusi perlu memperhatikan sumber dana yang tersedia dalam pembuatan rencana anggaran misalnya dana rutin, dana pembangunan serta anggaran lainnya yang tersedia. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengadministrasiannya.

Pembiayaan pendidikan merupakan suatu konsep yang seharusnya ada dan tidak dapat dipahami tanpa mengkaji konsep-konsep yang mendasarinya. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa

tanpa biaya, proses pendidikan di sekolah tidak dapat dilaksanakan. Biaya (cost) dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga. Dalam pengertian ini misalnya iuran siswa adalah jelas merupakan biaya, tetapi sarana fisik, buku sekolah dan guru juga adalah biaya, bagaimana biaya-biaya itu direncanakan, diperoleh, dialokasikan merupakan persoalan pembiayaan atau pendanaan pendidikan (*educational finance*).

Biaya pendidikan yang berasal dari pemerintah khususnya yang diarahkan pada sekolah dasar tentu memerlukan manajerial yang tepat sebagai pengelola agar penggunaan anggaran dapat sesuai dengan kebutuhan sekolah atau siswa itu sendiri. Ketepatan dalam pengelolaan anggaran akan memberikan suatu nilai positif terhadap pembangunan maupun program peningkatan mutu pendidikan yang dicita-citakan oleh Bangsa Indonesia. Oleh karena itu setiap biaya pendidikan perlu pengelolaan yang tepat guna terutama pada sekolah dasar sangat membutuhkan pengelolaan pembiayaan pendidikan yang profesional.

Konsep otonomi sekolah dalam pembiayaan pendidikan memberikan kesempatan untuk menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber dana yang dimiliki oleh sekolah baik kepada masyarakat maupun pemerintah.

Menurut Supriadi (2010:3) Mengatakan biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental input yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif, biaya pendidikan memiliki peran yang sangat

menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan tidak akan tercapai seperti apa yang diharapkan. Paradigma umum pembiayaan pendidikan menekankan pada penyelesaian biaya rendah untuk meningkatkan efisiensi internal dan efisiensi eksternal sistem pendidikan pada jenjang sekolah yang berbeda.

Reformasi pendidikan merupakan respon terhadap perkembangan tuntutan global upaya untuk mengadaptasikan sistem pendidikan yang mampu mengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan zaman yang sedang berkembang. Melalui reformasi pendidikan, pendidikan harus berwawasan masa depan yang memberikan jaminan bagi perwujudan hak-hak azasi manusia untuk mengembangkan seluruh potensi dan prestasinya secara optimal guna kesejahteraan hidup di masa depan. Pengaruh pendidikan dapat dilihat atau dirasakan secara langsung dalam perkembangan serta kehidupan masyarakat, kehidupan kelompok, dan kehidupan setiap individu, maka pendidikan berurusan langsung dengan pembentukan manusianya yang diharapkan oleh sistem pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional.

Sejalan dengan uraian di atas Depdiknas (1999:97-98) memandang perlu dilakukan serangkaian strategi pengelolaan keuangan sebagai berikut: a) pengguna anggaran benar-benar di sesuaikan dengan rencana anggaran biasanya dipertanggung jawabkan secara transparan dan rasional oleh pengelola keuangan, b) pengguna dana anggaran dilakukan seefisien mungkin dan menghindari secara maksimal kerugian atas pembelian sesuatu barang yang tidak dibutuhkan, c) pengelolaan keuangan berusaha menghindari kesan bahwa seolah-olah menghabiskan dana anggaran, d) pengeluaran dana

keuangan dilakukan oleh petugas yang berwenang yaitu oleh bendahara, c) berbagai macam dana keuangan yang terkumpul baik berasal dari dana rutin maupun yang berasal dari dana pembangunan hendaknya dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan institusi.

Jika dicermati sumber dana yang ada di sekolah pada dasarnya dapat dibagi atas:

1) dana yang berasal dari kas negara/daerah, 2) dana yang berasal dari iuran siswa, serta 3) dana yang berasal dari komite sekolah. Berbagai sumber keuangan tersebut perlu dikelola dengan baik sehingga memberi kontribusi yang efektif terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Untuk mengoptimalkan proses pengadministrasian keuangan pada lembaga pendidikan khususnya di sekolah perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut: a) pemasukan dan pengeluaran uang tercatat secara tertib dan disertai kuintansi pengeluaran. Dalam kegiatan pemasukan dan pengeluaran keuangan tersebut pihak pengelola menghindari rekayasa karena dapat menyebabkan kecurigaan dari personil sekolah yang lain, b) bukti pencatatan penerimaan dan pengeluaran tersebut terdokumentasi dengan baik serta siap diperiksa setiap saat. Dalam konteks ini setiap saat catatan pemasukan dan pengeluaran uang institusi dalam posisi siap untuk dipertanggung jawabkan kepada pihak yang berwenang, c) pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan transparansi.

Berdasarkan observasi awal dilakukan pada sekolah SDN 2 Milangodaa Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menunjukan bahwa pengelolaan keuangan sekolah masih sepenuhnya merupakan otoritas kepala sekolah, Meskipun sekolah memiliki bendahara.

Kondisi tersebut ini menyebabkan pembiayaan kegiatan pendidikan di sekolah kurang mampu mengakomodasi kebutuhan dasar sekolah sebagaimana yang telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Serta perlunya perbaikan pengelolaan keuangan sehingga segala aktivitas yang terkait dengan pengelolaan keuangan dapat terkoordinasi dengan baik. Realitas tersebut menjadi dasar untuk melakukan pengkajian lebih lanjut tentang pengelolaan pembiayaan keuangan melalui penelitian yang diformulasikan dengan judul: **“Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Sekolah di SDN 2 Milangodaa Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka fokus dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan keuangan dan pembiayaan di SDN 2 Milangodaa Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
2. Pelaksanaan keuangan dan pembiayaan di SDN 2 Milangodaa Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
3. Pengawasan keuangan dan pembiayaan di SDN 2 Milangodaa Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
4. Mengevaluasi keuangan dan pembiayaan di SDN 2 Milangodaa Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perencanaan keuangan dan pembiayaan di SDN 2 Milangodaa Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan keuangan dan pembiayaan di SDN 2 Milangodaa Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
3. Untuk mengetahui pengawasan keuangan dan pembiayaan di SDN 2 Milangodaa Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
4. Untuk mengetahui evaluasi keuangan dan pembiayaan di SDN 2 Milangodaa Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk kepala sekolah sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran pembiayaan pendidikan
2. Untuk seluruh warga sekolah sebagai bahan masukan terutama kepala sekolah, bendahara tentang substansi keterlibatan komite sekolah dari perencanaan sampai dengan evaluasi pemanfaatan anggaran pembiayaan pendidikan
3. Untuk komite sekolah merupakan sebuah badan independen yang mewakili masyarakat dalam pengelolaan sekolah secara transparan
4. Untuk peneliti sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut